REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG PENINGKATAN KERJASAMA ANTARA PEJABAT PERTAHANAN DAN KEGIATAN BIDANG PERTAHANAN TERKAIT

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam (selanjutnya disebut "Pihak" bila salah satu sisi dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak")

MENGINGAT Deklarasi Antara Republik Indonesia dan republik Sosialis Vietnam tentang Kerangka Hubungan Persahabatan dan Kemitraan Komprehensif Memasuki Abad ke-21 yang ditandatangani di Hanoi tanggal 26 Juni 2003;

MENGAKUI kepentingan bersama mereka dalam mempromosikan hubungan yang ramah dan bersahabat untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan di antara rakyat kedua negara;

BERKEINGINAN untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral yang sudah ada antara kedua negara melalui kegiatan kerjasama di bidang pertahanan berdasarkan semangat bertentangga yang baik, saling percaya dan pengertian;

MENCATAT bahwa peningkatan kerjasama pertahanan akan memberikan kontribusi pada hubungan yang saling menguntungkan kedua pertahanan nasional.

SESUAI dengan hukum dan peraturan yang berlaku dari kedua negara;

TELAH MENYETUJUI sebagai berikut:

PASAL I
TUJUAN

Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini adalah untuk menyediakan kerangka kerja yang komprehensif guna meningkatkan kerjasama pertahanan yang saling menguntungkan antara institusi pertahanan dan militer kedua Pihak

PASAL II
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerja sama dalam Perjanjian ini meliputi

a. Saling Kunjung diantara Institusi Pertahanan dan Militer kedua Pihak;

b. Konsultasi berkala mengenai isu-isu pertahanan yang menjadi perhatian bersama;

c. Kerja sama antara Angkata Bersenjata kedua negara,

d. Pendidikan dan pelatihan;

e. Pertukaran intelijen militer

f. Kerja sama riset dan teknotogi dalam bidang industri pertahanan;

g. Kerja sama di bidang lain yang menyangkut kepentingan bersama

PASAL III
INSTITUSI PELAKSANA

Institusi yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini:

Untuk Indonesia	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
Untuk Vietnam	Kementerian Pertahanan Nasional Republik Sosialis Vietnam

PASAL IV
PENGATURAN PELAKSANAAN

Dalam rangka melaksanakan Memorandum Saling Pengertian ini. hal-hal-hal operasional, administrasi dan teknis akan diatur dalam pengaturan pelaksanaan terpisah yang akan dibentuk kedua Pihak.

PASAL V
KOMITE BERSAMA

1. Komite Bersama akan dibentuk untuk mencapai tujuan Memorandum Saling Pengertian ini secara efektif

2. Pertemuan akan diketuai oleh pejabat pertahanan senior dari kedua Pihak.

3 Komite Bersama akan:

   a. mengidentifikasi hal-hal yang menjadi kepentingan bersama;

   b. merekomendasikan kegiatan-kegiatan dan program-program kerjasama dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian ini,

   c. mengkoordinasikan, memantau, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan program-program kerjasama dimaksud;

   d. mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini setiap tahunnya;

   e. menyampaikan laporan tahunan kepada masing-masing Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Bersenjata atau Ketua Komite Bersama dari masing-masing Pihak, dan

   f. menyelesaikan setiap perbedaan pandangan atau selisih faham mengenai pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini

4. Komposisi dan jumlah anggota Komite Bersama akan disepakati bersama oleh kedua Pihak. Termasuk para pakar dalam jumlah terbatas dari pihak yang bersangkutan dan departemen atau instansi terkait.

5. Komite Bersama akan mengadakan pertemuan setahun sekali atau apabila diperlukan, setiap saat dengan tempat dan waktu yang telah disepakati bersama.

6. Komite Bersama dapat membentuk Sub-komite ketika dianggap perlu untuk melaksanakan kegiatan kerjasama, program, atau tugas-tugas khusus lainnya. Sub-Komite wajib melaporkan hasilnya kepada Komite Bersama.

PASAL VI
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Para Pihak sepakat bahwa bahwa setiap kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan bersama-sama dimiliki dan:

   a. Masing-masing Pihak dibolehkan untuk menggunakan kekayaan intelektual tersebut untuk tujuan memelihara, mengadaptasi dan memperbaiki kekayaan dimaksud;
   b. Setiap Pihak harus bertanggung jawab atas segala klaim yang dibuat oleh Pihak Ketiga atas kepemilikan dan keabsahan penggunaan hak-hak kekayaan intelektual yang dibawa oleh Pihak tersebut untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini.

2. Jika salah satu Pihak ingin mengungkapkan data rahasia dan/atau informasi yang dihasilkan dari kegiatan kerja sama berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini kepada pihak ketiga, pihak yang mengungkapkan harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lainnya sebelum pengungkapan dilaksanakan.

3 Dalam hal kekayaan intelektual digunakan oleh Pihak dan/atau institusi yang mengatasnamakan Pemerintah untuk tujuan komersial, Pihak lain berhak mendapat bagian royalti yang adil.

4. Ketika salah satu Pihak membutuhkan Pihak lain di luar Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini untuk usaha komersial apapun dari kekayaan intelektual yang dicakup oleh Memorandum Saling Pengertian ini, Pihak ini akan memberikan preferensi pertama dari kerja sama pada Pihak lain dalam Memorandum Saling Pengertian ini, yang akan dibebaskan, jika Pihak lain tidak dapat berpartisipasi dalam cara yang saling menguntungkan.

PASAL VII
PERLINDUNGAN INFORMASI RAHASIA

1. Para Pihak sepakat untuk melindungi informasi rahasia yang dapat diakses dalam kerangka kerja sama Memorandum Saling Pengertian ini sesuai dengan hukum dan peraturan nasional yang berlaku.

2. Informasi rahasia dan peralatan hanya dapat diberikan melalui saluran resmi ataupun saluran lain yang disetujui oleh Ketua Komite Bersama. Informasi rahasia dan peralatan tersebut akan diberi label seauai dengan tingkat dan dinyatakan sebagai berikut:

INDONESIA	VIETNAM	INGGRIS
SANGAT RAHASIA	Tuyệt Mật	TOP SECRET
RAHASIA	Tối Mật	SECRET
TERBATAS / KONFIDENSIAL	Mật	CONFIDENTIAL
BIASA	-	UNCLASIFIED

3. Seluruh informasi dan peralatan yang diterima dalam kerangka kerja pada Memorandum Saling Pengertian ini tidak dapat dialihkan, diumumkan atau disebarluaskan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sementara ataupun bersifat tetap, kepada pihak ketiga, baik perorangan maupun badan, tanpa izin tertulis dari Pihak asal informasi.

PASAL VIII
PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL

Setiap orang yang terikat dengan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Memorandum Saling Pengertian ini tidak boleh melanggar hukum dan peraturan, kebebasan politik, kedaulatan, integritas wilayah, dan penegakan hukum yang berlaku pada masing-masing Pihak.

PASAL IX
ALOKASI ANGGARAN

1. Pihak tuan rumah penyelenggara pertemuan di wilayahnya akan menanggung seluruh biaya yang dikeluarkan guna pertemuan tersebut. Delegasi masing-masing Pihak akan menanggung sendiri biaya perjalanan dan akomodasi bagi yang hadir ke pertemuan.

2 Biaya-biaya lain dalam pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan diatur oleh pengaturan keuangan yang terpisah berdasarkan kesimpulan antara kedua Pihak.

PASAL X
PENYELESAIAN SENGKETA

1. Setiap perbedaan yang timbul dari atau dalam hubungannya dengan penafsiran atau penerapan Memorandum Salin Pengertian ini harus, dalam kesempatan pertama, diserahkan kepada Komite Bersama untuk penyelesaian secara damai.

2. Jika perbedaan tidak dapat diselesaikan pada tingkat Komite Bersama, baik Kedua Ketua Komite Bersama akan membawa masalah mereka kepada masing-masing Menteri Pertahanan dan/atau Panglima Angkatan Bersenjata untuk penyelesaian secara damai.

3. Dalam hal sengketa tidak diselesaikan dalam ayat 2, hal itu akan diselesaikan oleh Para Pihak melalui saluran diplomatik.

PASAL XI
PERUBAHAN

1. Memorandum Saling Pengertian ini dapat diubah dengan membuat pernyataan secara tertulis atas persetujuan bersama oleh kedua Pihak.

2. Setiap perubahan terhadap Memorandum Saling Pengertian ini mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan selanjutnya Para Pihak memberitahukan bahwa semua persyaratan dalam negeri yang diperlukan telah dipenuhi.

PASAL XI
PEMBERLAKUAN DAN PENGAKHIRAN

1. Para Pihak akan memberitahukan satu sama lain secara tertulis setelah kebutuhan dalam negeri masing-masing untuk berlakunya Memorandum Saling Pengertian ini telah dipenuhi. Memorandum Saling Pengertian akan mulai berlaku 30 hari sejak tanggal pemberitahuan selanjutnya.

2 Memorandum Saling Pengertian ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan pada waktu berakhirnya dapat diperbaharui untuk lima (5) tahun berikutnya, kecuali dihentikan oleh salah satu Pihak dengan menyampaikan pemberitahuan terakhir secara tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum Pihak tersebut bermaksud mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini.

3. Pada saat Memorandum Saling Pengertian ini berakhir, Para Pihak akan menentukan langkah lebih lanjut untuk semua proyek yang sedang berlangsung, yang dilaksanakan dalam rangka Memorandum Saling Pengertian ini berdasarkan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang ditentukan secara jelas persyaratan dan kondisi.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan dibawah ini, dengan diberi kuasa oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.

Dibuat di Ha Noi pada hari ini **Rabu** tanggal **27 Oktober 2010**, dalam rangkap dua, masing-masing dalam bahasa Indonesia, bahasa Vietnam dan bahasa Inggris, seluruh naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah dalam bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM
SIGNED	SIGNED
PURNOMO YUSGIANTORO MENTERI PERTAHANAN	GENERAL PHUNG QUANG THANH MENTERI PERTAHANAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

BẢN GHI NHỚ

GIỮA

CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ IN-ĐÔ-NÊ-XI-A

VÀ

CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VỀ

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC GIỮA CÁC QUAN CHỨC QUỐC PHÒNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN

Chính phủ nước Cộng hoà In-đô-nê-xi a và Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dưới đây được gọi riêng là "Bên" và gọi chung là "hai Bên";

Nhắc lại Tuyên bố về "Khuôn khổ hợp tác hữu nghị, toàn diện bước vào thế kỷ 21" được ký tại Hà Nội ngày 26/6/2003;

Thừa nhận lợi ích chung trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị, thân thiện và cùng hợp tác để thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng giữa nhân dân hai nước;

Mong muốn củng cố và tăng cường quan hệ song phương giữa hai nước thông qua các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng trên tinh thần láng giềng tốt, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau;

Nhận thấy việc tăng cường hợp tác quốc phòng sẽ đóng góp vào quan hệ cùng có lợi giữa hai nền quốc phòng;

Chiếu theo luật pháp và quy định hiện hành của hai nước;
Đã thoả thuận như sau:

ĐIỀU I
MỤC ĐÍCH

Mục đích của Bản Ghi nhớ này nhằm thiết lập một khuôn khổ chung để thúc đẩy quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa các cơ quan quốc phòng và quân sự của hai Bên.

ĐIỀU II
PHẠM VI HỢP TÁC

Phạm vi hợp tác của Bản Ghi nhớ này bao gồm:

1. Trao đổi chuyến thăm giữa các cơ quan quốc phòng và quân sự;
2. Tham vấn theo định kỳ về các vấn đề quốc phòng cùng quan tâm;
3. Hợp tác giữa Quân đội hai Bên;
4. Giáo dục và đào tạo quân sự;
5. Trao đổi tình báo quân sự;
6. Hợp tác khoa học và công nghệ trong công nghiệp quốc phòng;
7. Các lĩnh vực hợp tác khác về quốc phòng và quân sự do hai bên thống nhất.

ĐIỀU III
CƠ QUAN THỰC HIỆN

Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện Bản Ghi nhớ này:
Về phía Việt Nam: Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Về phía In-đô-nê xi-a: Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa In-đô-nê-xi-a.

ĐIỀU IV
THỎA THUẬN TIẾN HÀNH

Vì mục đích thực hiện Bản Ghi nhớ này, các vấn đề kỹ thuật liên quan đến việc triển khai, quản lý Bản Ghi nhớ sẽ phụ thuộc vào các thu xếp riêng do hai Bên thống nhất.

ĐIỀU V
ỦY BAN HỖN HỢP

1. Một Ủy ban Hỗn hợp sẽ được thành lập để thực hiện có hiệu quả Bản Ghi nhớ này.

2. Cuộc họp của Ủy ban Hỗn hợp sẽ do quan chức quốc phòng cấp cao thích hợp của hai Bên đồng chủ trì.

3. Ủy ban Hỗn hợp sẽ:

a. Xác định các vấn đề cùng quan tâm;

b. Đề xuất các hoạt động và chương trình hợp tác trong khuôn khổ Bản Ghi nhớ;

c. Điều phối, theo dõi, và kiểm tra việc thực hiện các hoạt động và chương trình hợp tác;

d. Hàng năm, xem xét và đánh giá việc thực hiện Bản Ghi nhớ;

e. Đệ trình báo cáo thường niên lên Bộ Quốc phòng của hai Bên;

f. Giải quyết bất đồng hoặc khác biệt về quan điểm trong việc thực hiện Bản Ghi nhớ này.

4. Thành phần và số lượng thành viên của Ủy ban Hỗn hợp sẽ do hai Bên cùng thống nhất. Có thể bao gồm các chuyên gia với số lượng không hạn chế từ các bộ, ngành, cơ quan khác có liên quan.

5. Ủy ban Hỗn hợp sẽ họp ít nhất hai năm một lần hoặc khi thấy cần thiết tại địa điểm do hai Bên thống nhất.

6. Ủy ban Hỗn hợp sẽ thành lập các Nhóm Công tác khi thấy cần thiết để thực hiện các chương trình, hoạt động hợp tác hoặc các nhiệm vụ cụ thể khác. Nhóm Công tác sẽ báo cáo lên Ủy ban Hỗn hợp.

ĐIỀU VI
BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1. Hai Bên nhất trí rằng mọi sở hữu trí tuệ nảy sinh khi thực hiện Bản Ghi nhớ sẽ được đồng sở hữu:

a. Mỗi Bên được phép sử dụng sở hữu trí tuệ cho mục đích duy trì, điều chỉnh và cải tiến sở hữu khác liên quan.

b. Mỗi Bên chịu trách nhiệm trước mọi sự khiếu nại của Bên thứ ba nào liên quan đến quyền sở hữu và tính hợp pháp của việc sử dụng quyền sở hữu trí tuệ do Bên đó đưa ra để thực hiện các hoạt động hợp tác theo Bản Ghi nhớ này.

2. Nếu một Bên muốn công bố số liệu hoặc thông tin một mình thành từ các hoạt động hợp tác theo Bản Ghi nhớ này cho bất kỳ Bên thứ ba nào, thì Bên công bố phải được sự đồng thuận trước của Bên kia trước khi việc công bố được thực hiện.

3. Trong trường hợp sở hữu trí tuệ do một Bên hoặc cơ quan đại diện Bên đó

sử dụng vào mục đích thương mại. Bên kia sẽ được nhận tỉ lệ lợi nhuận hợp quyền tương thích theo thỏa thuận riêng.

4. Bất cứ khi nào một Bên yêu cầu sự hợp tác của một Bên khác không thuộc Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa In-đô-nê-xi-a đối với bất kỳ thương vụ nào liên quan tới sở hữu trí tuệ trong phạm vi Bản Ghi nhớ này, tất Bên có phải thảo luận trước việc hợp tác này với Bên còn lại, nếu Bên còn lại không tỏ thái độ tham gia theo cách cùng có lợi thì việc hợp tác sẽ bị hủy bỏ.

ĐIỀU VII
BẢO VỆ THÔNG TIN MẬT

1. Hai Bên bảo vệ thông tin mật được tiếp cận trong khuôn khổ Bản Ghi nhớ này theo luật pháp và quy định của nước mình.

2. Thông tin và thiết bị mật chỉ được cung cấp thông qua kênh chính thức hoặc các kênh khác do Đồng Chủ tịch ủy ban Hỗn hợp của hai Bên thống nhất. Thông tin và thiết bị được dán nhãn biểu thị độ mật và tình trạng nguyên bản như sau:

Tiếng Indonexia	Tiếng Anh	Tiếng Việt
SANGAT RAHASIA	TOP SECRET	TUYỆT MẬT
RAHASIA	SECRET	TỐI MẬT
TERBATAS/KONFIDENSIAL	CONFIDENTIAL	MẬT

3. Tất cả các thông tin và thiết bị nhận được trong khuôn khổ Bản Ghi nhớ này sẽ không được chuyển giao, công bố hoặc tiết lộ, dù trực tiếp hay gián tiếp, tạm thời hay lâu dài cho bất kỳ Bên thứ ba nào, dù là cá nhân hay tổ chức, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên cung cấp.

ĐIỀU VIII
GIỚI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA NHÂN SỰ

Mọi cá nhân tham gia vào các hoạt động liên quan đến Bản Ghi nhớ không được vi phạm luật pháp, quy định, độc lập chính trị, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các hoạt động hành pháp của các Bên tương ứng.

ĐIỀU IX
TRU XẾP TÀI CHÍNH

1. Bên chủ trì phiên họp trong lãnh thổ của mình sẽ chịu mọi chi phí tổ chức phiên họp đó. Mỗi đoàn đại biểu của các Bên tự chịu chi phí đi lại, ăn và ở để tham dự phiên họp.

2. Các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện Bản Ghi nhớ phụ thuộc vào các thỏa thuận tài chính riêng do hai Bên thống nhất.

ĐIỀU X
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

1. Mọi vấn đề nảy sinh liên quan đến việc hiểu, áp dụng và thực hiện Bản Ghi nhớ này, trước tiên, sẽ được đệ trình lên Ủy ban Hỗn hợp để giải quyết một cách hữu nghị.

2. Trong trường hợp tranh chấp không giải quyết được ở cấp Ủy ban Hỗn hợp, hai Đồng Chủ tịch của Ủy ban Hỗn hợp sẽ đệ trình vấn đề lên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của mỗi Bên tương ứng để giải quyết một cách hữu nghị.

3. Trong trường hợp vẫn chưa giải quyết được theo Mục 2, tranh chấp sẽ được hai Bên giải quyết thông qua kênh ngoại giao.

ĐIỀU XI
SỬA ĐỔI

1. Bản Ghi nhớ này có thể được sửa đổi với sự đồng thuận bằng văn bản của cả hai Bên.

2. Mọi sửa đổi của Bản Ghi nhớ này sẽ có hiệu lực vào ngày thông báo sau cùng của các Bên cho nhau rằng các thủ tục nội bộ đã được hoàn tất.

ĐIỀU XII
HIỆU LỰC VÀ HỦY BỎ

1. Các Bên sẽ thông báo cho nhau bằng văn bản về việc đã hoàn tất các thủ tục nội bộ để Bản ghi nhớ có hiệu lực. Bản ghi nhớ này sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày thông báo sau cùng của các Bên cho nhau.

2. Bản Ghi nhớ có hiệu lực trong vòng năm (5) năm và sẽ tự động gia hạn thêm năm (5) năm nếu không Bên nào thông báo bằng văn ý định hủy bỏ Bản Ghi nhớ ít nhất 90 ngày trước khi hết hiệu lực.

3. Trước khi hủy bỏ Bản Ghi nhớ, hai Bên sẽ quyết định tiến trình tiếp theo cho các dự án đang triển khai trong khuôn khổ Bản Ghi nhớ với thời hạn và điều kiện được xác định rõ ràng.

ĐỂ LÀM BẰNG, những người ký tên dưới đây, được Chính phủ của mình uỷ quyền đầy đủ và hợp lệ, đã ký Bản ghi nhớ này.

LÀM tại Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2010 thành hai bản gốc, mỗi bản bằng tiếng Việt, tiếng In-đô-nê-xi-a và tiếng Anh; các bản đều có giá trị như nhau. Trong trường hợp có sự giải thích khác nhau, văn bản tiếng Anh được dùng làm cơ sở.

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA INĐÔNÊXIA	THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM
SIGNED	**SIGNED**
NGÀI PURNOMO YUSGIANTORO BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG	ĐẠI TƯỚNG PHÙNG QUANG THANH BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM ON STRENGTHENING OF COOPERATION BETWEEN DEFENCE OFFICIALS AND ITS RELATED ACTIVITIES

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam hereinafter referred to singularly as the "Party" and collectively as the "Parties";

Recalling the Declaration on the Framework of Friendly and Comprehensive Partnership Entering the 21st Century, signed in Hanoi on 26 June 2003;

Recognizing their common interest in promoting cordial and friendly relation and mutual cooperation in order to promote peace, stability and prosperity between the peoples of the two countries;

Desiring to enhance and strengthen the existing bilateral relationship between the two countries through cooperative activities in the field of defence in the spirit of good neighbourliness, mutual trust and understanding;

Noting that the strengthening of defence cooperation will contribute to the mutually beneficial relations of both national defences;

Pursuant to the prevailing laws and regulations of the two countries;

Have agreed as follows:

ARTICLE I
PURPOSE

The purpose of this Memorandum of Understanding is to provide a common framework for promoting beneficial cooperation between defence and military agencies of both Parties

ARTICLE II
SCOPE OF COOPERATION

The scope of cooperation of this Memorandum of Understanding may include:

1. Exchange of Visits between Defence and Armed Forces agencies;
2. Regular Consultation on defence issues of common concern;
3. Cooperation between the two Armed Forces;
4. Education and training;
5. Military Intelligence Exchange;
6. Cooperation in Science and Technology in defence industry;
7. Other areas of cooperation as mutually agreed.

ARTICLE III
EXECUTING AGENCIES

Agencies responsible for the implementation of this Memorandum of Understanding:

For Indonesian side : the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia

For Vietnamese side : the Ministry of National Defence of the Socialist Republic of Viet Nam

ARTICLE IV
IMPLEMENTING ARRANGEMENTS

For the purpose of the implementation of this Memorandum of Understanding, the operational, administrative and technical matters shall be subject to separate implementing arrangements to be concluded between both Parties.

ARTICLE V
JOINT COMMITTEE

1. A Joint Committee shall be established to effectively achieve the purpose of this Memorandum of Understanding
2. The Meeting of the Joint Committee shall be co-chaired by the appropriate senior defence officials from both Parties.
3. The Joint Committee shall:
   a. identify issues of common concern and interest;
   b. recommend cooperative activities and programmes within the framework of this Memorandum of Understanding;

c. coordinate, monitor, and control the implementation of the cooperative activities and programmes;

d. review and evaluate the implementation of this Memorandum of Understanding annually;

e. submit annual report to the respective Defence Ministers of both Parties; and

f. settle any difference or divergence of views on the implementation of this Memorandum of Understanding

4. The composition and the number of the members of the Joint Committee shall be mutually agreed by both Parties. It may include experts in limited numbers from other ministries, departments or related institutions.

5. The Joint Committee shall meet at least once in two years or as and when it deems necessary in a place mutually agreed

6. The Joint Committee may establish Working Groups as and when it deems necessary for carrying out cooperative activities, programmes, or other specific tasks. The Working Groups shall report to the Joint Committee.

ARTICLE VI
PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

1 The Parties agree that any intellectual property arising under the implementation of this Memorandum of Understanding will be jointly owned and:

a. Each Party shall be allowed to use such intellectual property for the purpose of maintaining, adapting and improving the relevant property.

b Each Party shall be liable for any claim made by any third party on the ownership and legality of the use of the intellectual property rights which is brought in by the aforementioned Party for the implementation of the cooperation activities under this Memorandum of Understanding

2. If either of the Party wishes to disclose confidential data and/or information resulting from the cooperation activities under this Memorandum of Understanding to any third party, the disclosing party must obtain prior consent from the other Party before any disclosure can be made.

3. In the event the intellectual property is used by the Party and/or institution on behalf of the Government for commercial purposes, the other Party shall be entitled to obtain equitable portion of royalty.

4. Whenever either Party requires the cooperation of another party outside the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Viet Nam for any commercial undertaking resulting from intellectual property covered by this Memorandum of Understanding, this Party will give first preference of the cooperation to the other Party under this Memorandum of Understanding, which will be waived, if the other Party is unable to participate in a mutually beneficial manner.

ARTICLE VII
PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION

1. The Parties shall protect the classified information to which they may have access to within the framework of this Memorandum of Understanding in accordance with their national laws and regulations.

2. The classified information and equipment shall only be provided through official channels or other channels agreed upon by Co-Chairs of the Joint Committee. These information and equipment are to be labelled with the indication level and State of Origin as follows:

INDONESIAN	VIETNAMESE	ENGLISH
SANGAT RAHASIA	[illegible]	TOP SECRET
RAHASIA	[illegible]	SECRET
TERBATAS/ KONFIDENSIAL	[illegible]	CONFIDENTIAL
BIASA	-	UNCLASIFIED

3. All information and equipment received in the framework of this Memorandum of Understanding shall not be transferred, disclosed or released, either directly or indirectly, on temporary or permanent basis, to third parties, whether persons and entities, without the prior written consent of the originating Party.

ARTICLE VIII
LIMITATION OF PERSONNEL ACTIVITIES

Any persons enganged in activities related to this Memorandum of Understanding shall not infringe laws and regulations, political independence, sovereignty, territorial integrity and law enforcement activities of respective Parties.

ARTICLE IX
FINANCIAL ARRANGEMENTS

1. The Party hosting the meeting in its territory shall bear all expenses incurred in convening such meeting. Each Delegation of the Parties shall bear its own travel and accommodation expenses in respect of its attendance to the meetings.

2. Other expenses incurred in the implementation of this Memorandum of Understanding are subject to separate financial arrangement to be concluded between both Parties.

ARTICLE X
SETTLEMENT OF DISPUTES

1 Any matter arising from this Memorandum of Understanding with respect to its interpretation, application or implementation shall, in the first instance, be submitted to the Joint Committee for amicable settlement.

2 In the event that the dispute is not settled at the Joint Committee level, both Co-Chairs of the Joint Committee shall bring the matter to their respective Ministers of Defence for amicable settlement.

3. In the event that the dispute is not settled under paragraph 2, it shall be settled by the Parties through diplomatic channel.

ARTICLE XI
AMENDMENT

1. This Memorandum of Understanding may be amended in writing by mutual consent by both Parties.

2. Any amendment to this Memorandum of Understanding shall come into force on the date of the last notification of the Parties informing that all necessary domestic requirements have been complied with

ARTICLE XII
ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION

1. The Parties shall notify each other in writing after their respective domestic requirements for the entry into force of this Memorandum of Understanding have been complied with. The Memorandum of Understanding shall enter into force 30 days from the date of the last notification of the Parties.

2. This Memorandum of Understanding shall remain in force for a period of 5 (five) years and upon the expiry thereof may be renewed for another 5 (five) years unless it is renounced by either Party by sending a written notice to the other Party at least 90 (ninety) days prior to its intention to terminate this Memorandum of Understanding.

3. Upon the termination of this Memorandum of Understanding, the Parties shall determine further course of all ongoing projects concluded in the framework of this Memorandum of Understanding in clearly defined terms and conditions.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Memorandum of Understanding.

Done in **Ha Noi**, on Wednesday, the 27th day of October in the year 2010, in two originals, each in Indonesian, Vietnamese and English languages. All the texts are being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA	FOR THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
SIGNED	**SIGNED**
PURNOMO YUSGIANTORO MINISTER OF DEFENCE	GENERAL PHUNG QUANG THANH MINISTER OF NATIONAL DEFENCE